

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu negara berkembang di Asia tenggara yang mempunyai berbagai macam permasalahan sosial di masyarakat. Masalah sosial diartikan sebagai kondisi tatanan masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma, dan standar sosial di dalam bermasyarakat. Masyarakat memiliki permasalahan sosial, jika dalam suatu kondisi sosial menimbulkan berbagai macam keresahan dan kerugian baik itu fisik atau non fisik.

Struktur sosial masyarakat Indonesia yang merupakan negara berkembang cenderung memiliki lapisan-lapisan masyarakat yang berkembang. Permasalahan ini menimbulkan jarak antara ekonomi kelas atas dengan kelas bawah sehingga terjadi ketimpangan sosial yang membuat. Masalah sosial yang mudah ditemui di Indonesia adalah permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakatnya.

Penyebab dari timbulnya kemiskinan memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik itu dari motivasi dalam bekerja maupun pemanfaatan teknologi yang ada,
2. Pihak lembaga yang belum maksimal dalam menjalankan proses pembangunan,
3. Penyebaran sarana dan prasarana yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah,

4. Modal yang minim dalam proses pembangunan
5. Peraturan dan prosedur yang ada cukup berbelit.

Salah satu cara pemerintah Indonesia menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan melihat dari segala potensi yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan, pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya pemerintah dalam pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan potensi yang ada. Peran pemerintah dalam hal ini, melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu alat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melihat ketersediaan sumber daya yang mereka miliki, serta apa yang masyarakat desa perlukan dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Setiap kebijakan dan program dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa perlu memperhatikan permasalahan yang mereka hadapi melihat sumber daya yang mereka miliki, karena permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat desa bermacam-macam. Pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Suatu pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan sosial suatu kelompok masyarakat dalam hal ini ialah masyarakat desa. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fungsi sosial mengacu pada cara-cara masyarakat bertingkah laku atau melakukan tugas-tugas kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup individu, keluarga, masyarakat.

Sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam pertumbuhan perekonomian. Potensi yang ada di sektor pertanian serta masih banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada pertanian menjadikan pertanian ini menjadi perhatian yang khusus oleh pemerintah. Salah satu keuntungan yang dapat dilihat dari sektor pertanian adalah sektor pertanian ini tidak mudah terkena dampak krisis ekonomi dunia, yang dimana manusia di seluruh dunia membutuhkan sumber pangan untuk keberlangsungan hidup mereka, seperti contoh saat ini harga komoditas beras di dunia semakin meningkat, tetapi sumber daya yang tersedia belum maksimal. Hal ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Perkembangan perekonomian dan jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya mengakibatkan semakin minimnya lahan untuk kegiatan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian digantikan menjadi kawasan industri/pemukiman. Permasalahan

alih fungsi lahan ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat tiap harinya, membuat sektor industri dan pemukiman melakukan perluasan lahan guna meningkatkan produktivitas mereka. Pembangunan industri atau pemukiman di suatu lokasi memiliki nilai jual yang berbeda-beda, pengembangan akses pemukiman membuat lahan yang awalnya digunakan sebagai lahan pertanian beralih menjadi fasilitas penunjang kehidupan.

Pergeseran alih fungsi lahan pertanian menjadi industri atau pemukiman menyebabkan usaha tani mengalami penurunan dalam produktivitas serta pengembangan yang berdampak kepada kecilnya daya saing produk pertanian domestik. Perubahan lahan pertanian merupakan isu strategis dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Alih fungsi lahan selain untuk dijadikan untuk kebutuhan industri juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan pemukiman warga akibat meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia.

**Tabel 1.1**

**Luas Lahan Pertanian di Indonesia Tahun 2013-2017**

No.	Jenis Lahan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sawah	8.128.499 Ha	8.111.593 Ha	8.092.906 Ha	8.187.733 Ha	8.162.608 Ha
2.	Kebun	4.817.170 Ha	4.763.341 Ha	4.755.054 Ha	4.782.642 Ha	4.745.026 Ha
3.	Ladang	5.123.625 Ha	5.036.409 Ha	5.190.378 Ha	5.074.222 Ha	5.222.066 Ha
	Jumlah	18.069.294 Ha	17.911.343 Ha	18.038.338 Ha	18.044.597 Ha	18.129.700 Ha

*(sumber: Statistik Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2018)*

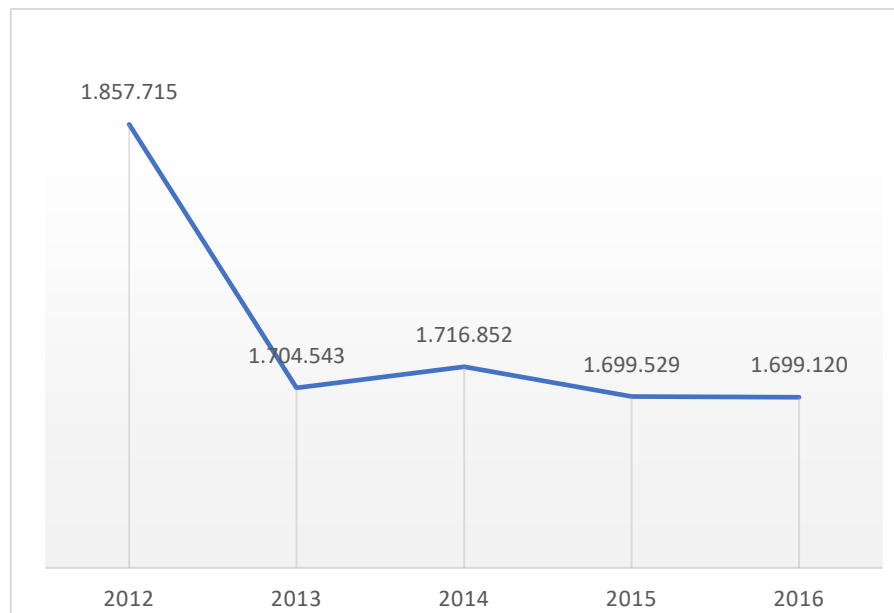
Berdasarkan Tabel 1.1 dari tahun 2013 sampai tahun 2017 lahan pertanian di Indonesia terus mengalami penurunan. Luas lahan pertanian meliputi luas lahan sawah, lahan tegal/kebun, dan lahan lading. Pada Tahun 2013-2014 luas lahan pertanian mengalami penurunan sebesar 94.827 Ha, di Tahun 2014-2015 penurunan sebesar 18.687 Ha, pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 94.827 Ha, lalu mengalami penurunan kembali di Tahun 2017 sebesar 25.125 Ha. Luas lahan perkebunan mengalami penurunan dari Tahun 2013-2015 dan meningkat kembali di tahun 2016, tetapi kemali menurun di tahun 2017. Berbeda dengan lahan ladang, mengalami naik turun di setiap tahunnya untuk luas lahan pertanian di Indonesia.

Sektor pertanian di Jawa Tengah dapat menjadi salah satu penggerak utama dari roda perekonomian masyarakat. Salah satu sentra produksi padi yang menyuplai ketersediaan padi di Indonesia adalah Jawa Tengah. Wilayah ini mempunyai lahan pertanian yang luas serta memiliki tingkat kesuburan yang tinggi jika dibandingkan

daerah lainnya. Melihat dalam kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2016 jumlah lahan pertanian di Provinsi Jawa Tengah terus berkurang. Hal ini tentu berpengaruh terhadap jumlah produksi pertanian serta pendapatan petani. Berikut adalah grafik luas lahan di Provinsi Jawa Tengah.

**Grafik 1.1**

**Lahan Pertanian di Jawa Tengah Tahun 2012-2016**



*(sumber: Statistik Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2017)*

Berdasarkan grafik 1.1 diatas bahwa pada tahun 2012-2013 terjadi penurunan jumlah luas lahan yang sangat besar yaitu 153.172 Ha, tahun 2013-2014 luas lahan pertanian mengalami sedikit peningkatan sebesar 12.309 Ha, namun pada tahun 2014-2015 luas lahan pertanian di Jawa Tengah kembali mengalami penurunan sebesar 17.323 Ha dan pada tahun 2015-2016 berkurang lagi sebesar 409 Ha.

Surakarta yang termasuk salah satu Kota yang memiliki dataran rendah, hal ini menjadikan Surakarta berpotensi sebagai lahan pertanian produktif. Kota Surakarta, perubahan fungsi lahan terus terjadi, sehingga lahan pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akibat pengalihan lahan yang dulunya merupakan lahan pertanian produktif yang telah disulap menjadi lokasi pengembangan industri dan pemukiman, lahan produktif pertanian menyusut. Pembangunan perumahan yang saat ini sedang meningkat terlihat di wilayah Mojosongo dan Jebres Kota Surakarta, berbeda dengan wilayah Surakarta bagian tengah seperti Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan sudah tidak ada lagi lahan kosong, tingginya pembangunan industri ataupun mall menjadi salah satu penyebab penyusutan lahan produktif pertanian. Penyusutan lahan produktif pertanian atau lahan kosong yang seharusnya dapat dijadikan lahan pertumbuhan hijau ini mengakibatkan daerah tengah Kota Surakarta ini menjadi kawasan rawan banjir jika sudah memasuki musim hujan.

Padatnya pemukiman atau industri di perkotaan menimbulkan berbagai macam masalah dari berbagai lini seperti kemiskinan, sulitnya mencari lahan untuk bermukim serta kelangkaan bahan pangan. Usaha yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah kelangkaan pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan lahan sempit serta menerapkan program *urban farming* (pertanian perkotaan). Pekarangan adalah lingkungan yang ada tersedia sekitar rumah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan komoditas pertanian. Menerapkan program *urban farming* dengan menanam tanaman yang produktif seperti hortikultura

(buah, sayuran, dan tanaman hias), rempah-rempah, tanaman obat merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Kota Surakarta guna memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar dipasok dari Tawangmangu yang berada di Kabupaten Karanganyar. Penyebabnya adalah karena kurangnya lahan pertanian untuk budidaya sayuran sehingga dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kota Surakarta menjalin kerjasama dengan Kabupaten Karanganyar.

Program pemberdayaan masyarakat di Surakarta yang melakukan kegiatan *urban farming* adalah Kampung Sayuran Organik yang terletak di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo. Dalam proses kegiatannya kelompok sayuran organik ini mendapat bantuan dana dan pendampingan dari Rumah Zakat Surakarta dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan lahan di sekitar rumah, agar menjadi lahan produktif. Salah satu lembaga, Rumah Zakat mempunyai program *urban farming* yaitu pertanian perkotaan dengan memanfaatkan potensi lahan kosong di sekitar rumah. Kelompok Sayuran Organik memanfaatkan peluang yang ada dengan menjalin kerjasama dengan Rumah Zakat dikarenakan sebagian besar warga memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik dan buruh bangunan. Berbagai macam usaha dilakukan oleh warga seperti, menyewakan sebagian rumah mereka untuk kos atau dikontrakkan kepada para mahasiswa yang berkuliah di kampus Universitas Sebelas Maret karena lokasinya yang dekat dengan daerah kampus.

Salah satu program pemberdayaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan potensi serta meningkatkan



pendapatan masyarakat dengan cara *urban farming* dijalankan oleh Kampung Sayur Organik di Ngemplak Sutan, Mojosongo, Jebres, Surakarta. Program pemberdayaan masyarakat ini sudah berjalan kurang lebih selama 7 tahun. Dengan adanya kampung sayuran organik, masyarakat diwajibkan untuk menanam bibit sayuran dalam *polybag* disekitar rumahnya masing-masing. Sekitar 80% warga sudah ikut menanam dan berpartisipasi dalam program kampung sayuran organik. Kampung Sayur Organik di Ngemplak Sutan yang menjalin kerjasama dengan Rumah Zakat mengelola bantuan dana dan mendapatkan pendampingan kelompok dari Rumah Zakat Surakarta.

Dalam kegiatan pemberdayaan, suatu kelompok memiliki kegiatan-kegiatan dalam proses pengembangan suatu kelompok, berikut program-program yang dijalankan Kelompok Sayur Organik di Desa Ngemplak Sutan:

No.	Jenis Program	Tujuan	Pencapaian	Persentase Pencapaian	Evaluasi Program
1	2	3	4	5	6
1.	Pengelolaan Sampah Rumah	Mengelola sampah secara mandiri menjadi bahan baku untuk mengelola sayuran, yaitu campuran pupuk kompos.	Pemilahan sampah organik dan anorganik, agar mudah dalam proses pengolahan menjadi pupuk kompos.	75%	Program sudah cukup rutin dijalankan, hanya saja masih ada beberapa warga yang tidak memanfaatkan pengolahan sampah ini sebagai proses daur ulang. Mereka langsung membuang sampahnya ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
2.	Program Kebun Gizi	Menjadikan Desa Ngeplak Sutan	Beberapa warga saja yang konsisten	50%	Perlunya sosialisasi dan motivasi dalam melakukan kegiatan agar

		sebagai desa mandiri pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	dalam mengelola sayuran di pekarangan rumah.		konsistensi masyarakat dalam menjalankan tetap terjaga.
3.	Program Menghias Ruas Jalan	Menjadikan Desa Ngemplak Sutan menjadi Desa Wisata yang dapat menarik perhatian masyarakat.	Dalam proses pengelolaan hanya beberapa warga saja yang terlibat dalam kegiatan, mengakibatkan proses kegiatan terbelang lambat.	30%	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ditingkatkan dan mencari alternatif untuk pengelolaan sumber dana guna menjalankan program menghias ruas jalan ini.

4.	Pembentukan Pra-Koperasi (Koperasi Sayur Mayur Kahuripan)	Membuat wadah bagi warga dalam proses jual-beli hasil dari pemberdayaan.	Peran koperasi kurang maksimal dalam kegiatan promosi dan masih banyak warga yang langsung menjual hasil sayur mereka ke pembeli.	50%	Melengkapi fasilitas dari alat/bahan untuk warga menjalankan program, dan menggunakan media online untuk memasarkan produk/kampung sayur organik ini.
----	---	--	---	-----	---

*Sumber: Dokumentasi Hasil Wawancara Peneli*

Pemberdayaan masyarakat dijalankan untuk mewujudkan masyarakat mandiri guna mendukung kemandirian masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat di Indonesia dan juga bisa menjadi alternatif lain dalam mendapatkan bahan pangan. Salah satu program pemberdayaan, yaitu Kampung Sayur Organik di Ngemplak Sutan ini sudah dijalankan sejak tahun 2013 dengan nama “Kebun Gizi”. Kelompok kampung sayuran organik di Ngemplak Sutan ini memiliki masalah yang sering terjadi sejak mereka berdiri, seperti kurang maksimalnya perkembangan organisasi serta bersaing dalam menghadapi berbagai macam masalah. Melihat dari faktor internal dan eksternal (dalam Jurnal Pengembangan Kampung Sayur Organik di Ngemplak Sutan, Mojosongo, Surakarta, 2016). Pada jurnal ini membahas kelamahan utama dalam menjalankan pemberdayaan kampung sayur organik salah satunya adalah kurangnya promosi sehingga kurang dikenal oleh masyarakat luas. Pemberdayaan Kampung Sayur Organik ini masih menuju proses kampung mandiri pangan, mengakibatkan mayoritas warga masih sekedar mengonsumsi hasilnya sendiri dan belum konsisten dalam menjalankan program pemberdayaan ini. Mayoritas warga bisa dikatakan musiman dalam menjalankan program kampung sayuran organik.

Gambar 1.1

Yayasan Rumah Zakat Memberi Pelatihan dan Fasilitas



*sumber:rumahzakata.org*

Produk yang dihasilkan oleh Kampung Sayuran adalah Sayuran Organik. Pengertian Sayuran organik adalah sayuran yang dibudidayakan secara alami tanpa ada bantuan bahan kimia. Pupuk yang diberikan untuk sayuran berasal dari pupuk organik, seperti kompos atau pupuk kandang, bukan pupuk kimia. Pembasmian hama juga tidak menggunakan pestisida dari bahan kimia. 2.6.1 Sayur Organik Macam-macam produk sayur:

1. Terong



3. Tomat



2. Cabai



4. Selada



5. Sawi



6. Ningkir



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Pada dasarnya, masyarakat boleh bebas memilih sayuran mana yang ingin ditanam, tidak ada bentuk kewajiban harus menanam tanaman tertentu. Hal ini bertujuan supaya masyarakat lebih menanam dengan sepenuh hati karena sesuai dengan kehendak hatinya. Tujuan utama dari menanam sayuran ini adalah bukan mencari keuntungan, maka tanaman yang bernilai jual lebih tinggi pun tidak menjadi standard masyarakat dalam menanam, karena masyarakat lebih banyak untuk dikonsumsi secara pribadi.

Gambar 1.2

Tempat pengolahan bahan-bahan organik



*sumber:facebook.com*

Selain menghasilkan sayur organik, masyarakat juga menggunakan dan memproduksi pupuk organik. Dalam hal ini masyarakat memanfaatkan sampah untuk pembuatan pupuk dan dapat dipasarkan. Pengolahan sampah organik berasal dari daun-daunan dan sayuran sisa konsumsi rumah tangga warga yang dikumpulkan, beberapa sampah dari rumah tangga warga juga dipilah untuk dijadikan bahan pembuatan pupuk. Masyarakat juga mempunyai alat untuk pengolahan sampah sehingga proses produksi lebih mudah.



Kampung Sayur Organik yang terletak di RW 37 Ngemplak Sutan, Kelurahan Mojosongo ini sudah membiasakan warganya untuk berpikir mandiri dalam bertindak. Masyarakat menyediakan tempat sampah berdasarkan golongan sampahnya. Sampah yang memang bisa didaur ulang akan didaur ulang atau dicacah untuk pupuk organik. Masyarakat dengan antusiasnya membuat pupuk organik sendiri. Sesuai dengan konsepnya "Sayur Organik" maka semua hal harus bersifat organik.

Kurangnya komitmen masyarakat yang belum memaksimalkan hal ini, membuat program pemberdayaan masyarakat ini tidak dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang menginginkan masyarakat bisa mandiri dalam mengelola dan meningkatkan ekonomi. Suatu program pembangunan dan pemberdayaan harus dibarengi dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Setiap proses pengelolaan, anggota masyarakatlah yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan yang ada di lapangan. Pelatihan dan pengembangan sudah diberikan dinas terkait untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat. Tujuan adanya program gini untuk pemecahan masalah masyarakat agar memiliki alternatif lain dalam memperoleh bahan pangan selain membeli, melihat mata pencaharian sebagian masyarakat tergolong ekonomi ke bawah. Kerjasama yang dijalankan oleh Kelompok Kampung Sayur Organik ini dinilai masih sedikit atau kurang. Kampung tersebut masih membutuhkan beberapa *stakeholder* baru yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat dan butuh sinergi antara *stakeholder*

dengan masyarakat dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. Kampung Sayur Organik masih membutuhkan banyak bantuan agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang maksimal. Permintaan pasar yang tinggi dan peluang yang ada sedangkan kondisi masyarakat kampung tersebut memiliki modal yang terbatas atau dana bantuan yang kurang bisa dikatakan sebagai faktor ancaman internal kampung sayur organik itu sendiri. Pemerintah dalam proses pembangunan tidak hanya menasar pada pembangunan infrastruktur, namun juga menasar pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan stunting. Salah satunya untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) karena telah diatur dalam Permendes No. 11/2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, sebaiknya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan meliputi kegiatan pelatihan dalam menjalankan program pemberdayaan, uji coba menggunakan tanaman di lahan yang ada, pengenalan jenis-jenis tanaman apa saja yang dapat ditanam serta dimanfaatkan, dan kunjungan ke pelatihan tanaman sayuran yang sudah maju dengan tujuan masyarakat dapat melihat bentuk nyata serta mengambil ilmu yang ada. Beberapa sayuran yang ditanam juga lumayan beragam walaupun terbatas mengingat Kota Surakarta bukan daerah dengan iklim dingin seperti cabai, terong, tomat, kangkung, selada, dan buah stroberi.

Program pemberdayaan masyarakat sendiri memiliki tujuan, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan kemandirian

masyarakat dalam berkehidupan dan juga mengelola perekonomian ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukannya suatu rencana strategi pengembangan serta manajemen pengelolaan yang efektif dan efisien agar Kampung Sayur Organik di Ngemplak Sutan mampu berkembang dan bersaing.

1.1.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Pengarang, Edisi Terbit, Judul	Masalah Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan pada Penelitian
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Peran Kelompok Tani Sayuran Organik Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal.</i> Indra Permana, Darwanto. 2016	Dalam Kelompok Tani Sayuran Organik tidak semua para petani bergabung dalam kelompok. Para petani yang tidak bergabung dengan kelompok memiliki kesulitan dalam pengolahan masa produksi, perawata	Mengidentifikasi bagaimana peran kelompok tani dalam menjalankan produksi budidaya sayuran <i>organik</i> sebagai salah satu cara pengembangan ekonomi lokal	Program pemberdayaan masyarakat memiliki strategi dalam pengembangannya, proses pemecahan masalah yang ada dalam pengembangan ekonomi lokal dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan budidaya sayuran <i>organik</i> di Desa Batur. Peranan kelompok tani dalam memaksimalkan potensi yang ada melalui program sayuran organik	Sama-sama mengkaji Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Sayur Organik yang membedakan adalah lokasi penelitian.

1	2	3	4	5	6
		<p>dan panen, contohnya penanggulangan hama tanaman. Kurangnya pemasaran hasil produk juga dirasakan petani yang tidak tergabung dalam kelompok.</p>	<p>dan strategi pengembangan ekonomi lokal melalui peran kelompok tani sayuran organik</p>	<p>dengan cara memberikan wawasan untuk meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk sayuran organik yang dihasilkan serta membuka akses pasar yang lebih luas lagi.</p>	
2.	<p><i>Pemberdayaan Masyarakat Desa Pagak Banjarnegara Melalui Transfer Teknologi Hidroponik Sayuran Organik.</i> Sarno. 2018.</p>	<p>Masyarakat Desa Pagak belum mengetahui pengembangan teknologi hidroponik sayuran organik sebagai desa wisata. Selain itu masyarakat juga belum mengoptimalkan</p>	<p>Terwujudnya desa wisata berbasis pertanian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan,</p>	<p>Melalui pengembangan Desa agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (indigenous knowledge)</p>	<p>Fokus penelitian ini mengkaji pengembangan pengetahuan petani guna mencapai Desa Wisata, berbeda dengan penelitian yang akan</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>potensi sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai potensi desa wisata di kawasan tersebut. Masyarakat setempat juga kurang dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di wilayah tersebut.</p>	<p>pemahaman, dan kapasitas serta keterampilan teknis pengembangan teknologi hidroponik</p>	<p>yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. Merujuk pada hasil kegiatan yang telah dilakukan maka diperlukan langkah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah kegiatan pendampingan secara berkelanjutan kepada masyarakat Desa Pagak dalam upaya pengelolaan desa wisata berbasis pertanian.</p>	<p>saya teliti, mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Sayur Organik dengan cara memaksimalkan potensi, peluang, serta sumber daya yang ada di sekitar lingkungan.</p>
3.	<p><i>Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui</i></p>	<p>Penanggulangan kemiskinan di suatu daerah dengan mengolah</p>	<p>Mengetahui bentuk dari adanya aksi pemberdayaan masyarakat pada</p>	<p>Melalui program wisata yang mendukung. Desa Bumiaji merupakan desa yang memiliki kawasan pertanian dan sekaligus</p>	<p>Sama-sama mengkaji Penanggulangan kemiskinan melalui program Pemberdayaan Masyarakat, yang</p>

1	2	3	4	5	6
1	<p><i>Progrm-Program Desa Wisata di Desa Bumiaji.</i> Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami,</p>	<p>potensi lokal yang ada di Desa Bumiaji</p>	<p>program desa wisata.</p>	<p>sebagai kawasan wisata berbasis alam yang mendukung. Dengan salah satu unggulannya yaiutu wisata petik apel. Dengan adanya desa wisata maka masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka mensukseskan program desa wisata.</p>	<p>membedakan Program serta lokasi penelitian.</p>
4.	<p><i>Strategi Pengembangan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kab. Gunung Kidul.</i> Dinar Wahyuni. 2018</p>	<p>Kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi</p>	<p>Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan serta meningkatkan mutu objek dan daya tarik Desa Wisata</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh Karang Taruna Putra Bukit Mandiri untuk menyadarkan masyarakat akan potensi desa Desa Nglanggeran.</p>	<p>Fokus penelitian ini membahas bagaimana strategi dalam pengembangan Desa Wisata, berbeda dengan akan saya teliti, mengkaji mengenai pemberdayaan masyarakat melalui</p>

1	2	3	4	5	6
		masyarakat dalam pengelolaan wisata.	Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul.	Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, kapasitas, dan perdayaan kehidupan.	program Kampung Sayur Organik.
5.	<p><i>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali).</i> Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, Muhamad. 2017</p>	Mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi	Memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa	<p><i>Pertama,</i> Desa Wisata Penglipuran merupakan salah satu desa wisata di Bali dengan daya tarik berupa pola tata ruang desa dan arsitektur bangunan tradisional yang khas, adat istiadat yang cukup unik dan kekayaan alam berupa hutan bambu.</p> <p><i>Kedua,</i> pemerintah sebagai salah satu <i>stakeholder</i> pariwisata diharapkan untuk lebih meningkatkan peranannya terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</p>	Fokus penelitian Pemberdayaan masyarakat mengkaji hubungan dari pengembangan desa wisata dengan ketahanan sosial budaya wilaya, sedangkan penelitian yang akan saya teliti memanfaatkan potensi dan peluang yang ada



1	2	3	4	5	6
			<p>wisata di Desa Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya</p>	<p><i>Ketiga</i>, masyarakat setempat diharapkan selalu menjaga kebersihan, kerapihan, keasrian, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. <i>Keempat</i>, dalam hal kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengelola desa wisata baik melalui internet maupun brosur agar dicantumkan lebih detail tentang kegiatan atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Penglipuran dan meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan promosi,</p>	<p>guna meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat</p>

1	2	3	4	5	6
6.	Eli Yuliawati, Universitas Negeri Yogyakarta 2012, Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui <i>Home Industry</i> di Dusun Pelemadu, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY.	Adanya kelompok wanita tani yang kurang baik, dikarenakan hanya memberikan ilmu yang didapat hanya kepada kelompok-kelompok nya saja bukan kepada masyarakat Desa Astomulyo. Sehingga tidak ada dampak positifnya bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan	Metode lapangan ( <i>field research</i> ) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Peran serta perempuan sangat membantu meningkatkan pendapatan keluarga, sangat membantu meningkatkan menambah bahkan mempertahankan hidup bagi kebutuhan keluarga.	Fokus penelitian Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui <i>Home Industry</i> , sedangkan pada penelitian ini adalah mengkaji mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Sayur Organik.

		manfaatnya dari kwt tersebut.			
--	--	----------------------------------	--	--	--

Berdasarkan beberapa contoh hasil penelitian terdahulu dapat dilakukan analisa mengenai persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian terdahulu ialah penulis sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian diskriptif kualitatif dijelaskan melalui penguraian kata-kata yang isinya menjabarkan tentang fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indra Permana Darwanto yang berjudul *Peran Kelompok Tani Sayuran Organik Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal* membahas menjelaskan bagaimana kegiatan pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu cara masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini masyarakat mempunyai ide dalam memanfaatkan keterbatasan yang ada di masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Para petani mempunyai gerakan dalam menjalankan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk suatu Kelompok Tani yang bertujuan menyejahterakan petani itu sendiri, contoh dari manfaat adanya lembaga kelompok tani, mereka dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar. Dalam proses pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani sayuran organik ini, peran pemerintah, kelompok tani, masyarakat sekitar sangat penting agar proses pengembangan pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan awal, yaitu kesejahteraan. Petani di Desa Batur tidak semuanya tergabung di dalam kelompok tani, para petani yang tidak tergabung dalam kelompok biasanya sudah memiliki pasar sendiri, tetapi harga ditentukan oleh pasar. Para petani yang tidak bergabung dalam kelompok kesulitan ketika mendapatkan masalah produksi seperti masa panen dan hama tanaman. Ketika permintaan rendah juga kesulitan untuk memasarkan produk sayuran *organik* sehingga harganya tidak stabil.

Salah satu bentuk pemecahan masalah yang diterapkan guna mengatasi permasalahan dalam proses pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan budidaya sayuran *organik* di Desa Batur, yaitu dengan cara mengoptimalkan peran kelompok tani sayuran. Kelompok tani sayuran *organik* nantinya memberikan fasilitas bagi para petani dalam melakukan budidaya sayuran *organik*, seperti membantu memberikan wawasan untuk meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk sayuran *organik* yang dihasilkan serta memberikan akses pasar yang luas untuk menjual produk yang telah dihasilkan.

Disisi lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarno yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Desa Pagak Banjarnegara Melalui Transfer Teknologi Hidroponik Sayuran Organik* melihat bagaimana Desa Pagak melakukan suatu bentuk upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan teknologi hidroponik sayuran. Program pengelolaan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kawasan Desa Pagak sebagai “Desa Wisata Berbasis Pertanian” yang diintegrasikan dan disinergikan dengan program sistem pertanian terpadu yang ramah lingkungan merupakan salah satu fokus utama. Permasalahan yang terjadi pada Desa Pagak bahwa masyarakat belum mengetahui pengembangan teknologi hidroponik sayuran organik sebagai desa wisata. Selain itu masyarakat juga belum mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai potensi desa wisata di kawasan tersebut. Tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Pagak melalui transfer teknologi hidroponik sayuran organik adalah sebagai berikut;

- a. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat secara langsung terkait dengan pengembangan teknologi sayuran organik kepada masyarakat Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- b. Mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat secara langsung dan membantu serta melakukan pendampingan secara kontinu agar masyarakat pada akhirnya bisa mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan penghasilan dari usaha yang telah dilakukan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, Eni Prasetyawati yang berlokasi di Desa Wisata Bumiaji melihat bahwa salah satu permasalahan yang menjadi fokus pemecahannya terkait dengan permasalahan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan Desa wisata maka masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka mensukseskan program desa wisata. Pemberdayaan masyarakat dalam program desa wisata Bumiaji mampu mengubah sebagian besar masyarakat untuk berubah. Misalnya perubahan pengetahuan tentang cara mengatur sebuah desa untuk dijadikan sebuah komoditi pariwisata yang mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu dengan adanya program pemberdayaan masyarakat itu juga masyarakat memiliki keterampilan dalam mengolah apel dan menyediakan tempat untuk *Homestay*. Hal itulah berdampak pada tingkat pendapatan

masyarakat di Desa Bumiaji meningkat. Desa wisata merupakan pola pembangunan desa yang menyatukan antara pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat. Letak pemberdayaan masyarakatnya adalah dengan memanfaatkan apa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan pada desa wisata. Selain itu juga masyarakat akan menjaga harmonisasi alam yang kemudian akan menghasilkan produktifitas tanaman. Pada desa wisata Bumiaji berkembang pula UMKM yang juga sebagai pemanfaatan dari konsep desa wisata.

Penelitian terakhir dari Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, Muhamad yang mengambil locus di Desa Wisata Penglipuran, Bali membahas tentang pengembangan desa wisata. Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Penglipuran tidak terlepas dari peran aktif masyarakat sekaligus sebagai usaha pemberdayaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan seni budaya.

Konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlandaskan falsafah agama Hindu yaitu *Tri Hita Karana* atau tiga penyebab keharmonisan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Falsafah ini diimplementasikan menjadi tiga aspek yaitu aspek *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran melalui tiga tahapan, meliputi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan terakhir tahap pemberian daya.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut nampak dari sikap beberapa warga terutama dari kalangan generasi muda yang berusaha untuk memodifikasi bentuk rumahnya ke arah modern. Kendala lainnya adalah masyarakat yang menjajakan dagangan dengan cara mengacung atau menawarkan dagangan dengan mendatangi wisatawan secara langsung, hal ini akan mengurangi kenyamanan wisatawan serta beberapa rumah tradisional tidak terawat dengan baik.

Peran pengelolaan kelompok pemberdayaan guna mengoptimalisasikan sumber daya yang ada serta mengawasi keberjalanan program pemberdayaan sangat penting guna mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan di latar belakang di atas dapat diambil pertanyaan penelitian yaitu **“Mengapa pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelompok**

**Sayur Organik Di Desa Ngemplak Sutan belum berjalan dengan maksimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat?”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program sayur organik di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta?
2. Apa faktor-faktor mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program sayur organik di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah suatu yang harus dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan sayur organik di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program sayur organik di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui uraian serta pembahasan yang terdapat pada penelitian ini nantinya diharapkan dapat:

1. Bagi peneliti, diharapkan Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan peneliti khususnya mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui kampung sayur organik.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil Penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang dihadapi Pengembangan Sayur Organik sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kelompok Kampung Sayur Organik agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.

## **1.5 Kajian Teori**

### **1.5.1 Administrasi Publik**

Menurut Kerlinger (dalam Pasolong, 2011:9) mendefinisikan serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut Pasolong (2011 : 10), teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset. Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.

Beberapa ahli memberikan definisi pada administrasi publik diantaranya sebagai berikut:

Menurut Felix A. Nigro Public Administration adalah usaha kelompok yang bersifat *cooperative* di lingkungan pemerintah, meliputi seluruh ketiga cabang pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta pertalian diantara ketiganya, mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik dan merupakan bagian proses politik, amat berbeda dengan administrasi privat, dan berhubungan erat dengan berbagai macam kelompok. kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan publik.

1. Menurut Chandler & Plano (dalam Pasolong 2014:7), administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.



2. Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong 2014:8), administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

Berdasarkan definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera adalah salah satu bentuk usaha yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan masyarakat yang ada di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Keberadaan Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui kegiatan-kegiatan atau program dari pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini menjadikan kegiatan perekonomian masyarakat menjadi efektif dan efisien yang dalam proses pelaksanaannya terdapat hubungan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swasta.

### **1.5.2 Paradigma Administrasi Publik**

Thomas S. Khun (dalam Pasolog 2014:27) mendefinisikan bahwa paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Karena Ilmu pengetahuan sifatnya nisbi, walaupun salah satu persyaratannya harus dapat diterima secara universal, namun dalam kurun waktu tertentu tetap memiliki perubahan, termasuk ilmu-ilmu ekstate sekalipun. Hanya ilmu-ilmu ekstate memang cenderung objek-objek, fakta-fakta, dan hukum-hukumnya relatif lebih lama untuk terpengaruh oleh situasi dan kondisi serta pengindriwian manusia, relatif

lebih pasti di bandingkan ilmu-ilmu sosial. Thomas S. Khun mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014:28) mengemukakan 5 (lima) paradigma administrasi publik sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1990-1926)

Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara ini berada. Pada masa ini dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara. Tonggak sejarah sebagai momentum dari fase ini adalah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonald D. White di dalam bukunya *Politics and Administration*, ia berpendapat bahwa ada 2 (dua) fungsi pokok pemerintahan yang amat berbeda satu sama lain. Dua fungsi pokok yang dimaksud adalah politik dan administrasi.

2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Lokus ketatanegaraan dalam paradigma ini tidak menjadi masalah dalam paradigma ini karena penekanannya, yaitu prinsip-prinsip ketatanegaraan lebih penting karena dipandang dapat diterapkan secara universal pada setiap jenis organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Manajemen memiliki prinsip yang kuat saat ini. Teorinya, meskipun berbeda dengan budaya, iklim, visi dan lain-lain, penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan di negara manapun. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick & Urwick (dalam Pasolong, 2014:29) adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgetting*).

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pengelolaan negara kembali terjun ke disiplin utama ilmu politik sebagai akibat dari fokus dan kritik konseptual yang dituangkan. Konsekuensinya adalah penyelesaian lokus, yaitu

birokrasi pemerintahan, dihidupkan kembali tetapi dengan demikian kehilangan penekanannya. Singkatnya, penentuan tahap ketiga ini sebagian besar merupakan upaya untuk membangun kembali ikatan intelektual antara ilmu politik dan administrasi negara. Ada dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah cara mengurangi ketegangan antara para ilmuwan administrasi dan ilmuwan politik secara berangsur-angsur: peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, perbandingan dan pembangunan administrasi yang mana mengalami pasang surut sebagai sub-bidang administrasi negara. Administrasi negara lintas budaya (*crosscultural public administration*) yang disebut juga pendekatan komparatif, merupakan bidang baru dari administrasi negara. Dijelaskan Ferrel Heady, perbandingan administrasi negara berfokus pada lima isu motivasi sebagai kegiatan ilmiah; pencarian teori; dukungan untuk aplikasi praktis; kontribusi untuk perluasan politik komparatif; kebutuhan peneliti yang mumpuni dalam tradisi hukum administrasi; dan studi banding dari berbagai masalah administrasi yang ada. Ada dua variasi dalam pemerintahan negara bagian, dengan masing-masing membuat analisis komparatif dari sub-bidangnya.

#### 4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)

Pada masa ini administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan *focus*, tetapi tidak ada *locusnya*.

#### 5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-Sekarang)

Pada masa ini administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik. Beberapa departemen, fakultas dan akademi baru administrasi negara dan *public affairs* bermunculan. Salah satu bentuk *trend* dari pertumbuhan administrasi negara ini adalah terbentuknya

asosiasi nasional dari fakultas-fakultas tersebut (*The National Association Of School Of Public Affairs And Administration*). Administrasi negara semakin menonjol bukan hanya karena diakui kalangan universitas sebagai bidang akademik yang tersendiri (di banyak tempat, ilmu ini tak hanya diajarkan sebagai sebuah jurusan, tapi bahkan berupa sebuah perguruan tinggi tersendiri), tapi bidang itu sendiri merupakan getaran semangat akademik, dan merupakan isyarat awal dari perubahan sosial. Jika negara harus ditangani dengan baik, menurut Rektor Harvard, Bok, maka pihak universitas harus berperan langsung dalam proses pembentukan sikap dan pemikiran para abdi negara tersebut.

Keberadaan program pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Sayur Organik di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta mengacu pada paradigma administrasi publik yang kelima, yaitu Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya teori manajemen dan teori organisasi yang dipakai dalam proses kegiatan pemberdayaan. Proses kegiatan pemberdayaan yang dimana lembaga Kelompok Sayur Organik sebagai aktor dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah organisasi. Kelompok Sayur Organik yang merupakan organisasi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen serta dalam proses pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari kebijakan publik. Segala permasalahan yang ada dalam proses kegiatan pemberdayaan mengacu kepada permasalahan dan kepentingan publik. Hal ini yang membuat paradigma yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang ada di Kelompok Sayur Organik Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik.

### **1.5.3 Manajemen**

Manajemen merupakan bagian yang penting dalam sistem administrasi publik didalamnya terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen diketahui pula sebagai sebuah

sistem yang mana proses-proses atau bagian-bagian di dalamnya saling berhubungan satu sama lain, yang apabila tidak terpenuhi salah satunya maka akan membuat pekerjaan menjadi tidak selesai atau menyebabkan masalah dalam organisasi.

Definisi manajemen menurut para ahli, antara lain:

1. Harold Koontz dan Cyril O'donnel

Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian.

2. R. Terry

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

3. James F. Stoner

Manajemen adalah proses perencanaan-perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, istilah manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi tersebut biasanya disebut sebagai merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dimana didalamnya terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi yang mendayagunakan sumber daya baik sumber daya manusia atau sumber daya alam agar dapat membantu tercapainya tujuan organisasi.

Pada proses pelaksanaan kegiatan yang ada di Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera menerapkan konsep manajemen, yang sudah berjalannya proses pengorganisasian, kepemimpinan, dan pemanfaatan dari sumber daya guna mencapai tujuan Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera.

### **1.5.3.1 Manajemen Publik**

Manajemen publik merupakan cabang dari administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan mengenai desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia dan evaluasi program dan audit (Ott. Hyde &Shafritz, 1990, h.ix). Sedangkan Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling*.

Manajemen Publik sebagai keilmuan sebenarnya berasal dari pemikiran yang sangat sederhana. Pada umumnya organisasi sektor publik akan diatur oleh manajer sektor publik. Manajer inilah yang akan berperan penting untuk mengatur berbagai hal dalam organisasi sektor publik. Studi mengenai bagaimana manusia melakukan manajemen terhadap organisasi pada sektor publik inilah yang kemudian disebut sebagai manajemen publik. Manajemen publik fokus pada internal organisasi sektor publik, yaitu bagaimana mengatur organisasi sektor publik bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan.

Pada proses kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelompok Sayur Organik di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah kegiatan organisasinya, dalam menjalankan kegiatan organisasinya tidak lepas dari proses manajemen yang mengatur jalannya organisasi tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam, yang didalamnya juga telah menerapkan fungsi manajemen seperti fungsi *planning*, *organizing* dan *controlling*.

## **1.5.4 Pemberdayaan Masyarakat**

### **1.5.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Dimana pemberdayaan dalam hal ini adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan daya atau kekuatan kepada pihak yang lemah. Menurut Suhartono (2017:57) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya mentransformasikan kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat mau dan mampu mengambil bagian secara aktif mendorong terjadinya perubahan. Pemberdayaan sendiri banyak didefinisikan oleh banyak pakar antara lain yaitu menurut Rappaport (dalam Totok Mardikanto, 2013: 26) mengartikan "*Empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives.*". Melihat pengertian tersebut pemberdayaan dapat diterjemahkan sebagai suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pada intinya pemberdayaan memberikan penekanan pada otonomi dalam pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas, sehingga masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal, seperti yang dinyatakan oleh Anthony Bebbington (dalam Mardikanto, 2013: 30) yakni "*Empowerment is a process through which those*

*exclude are able to participate more fully in decisions about forms of growth strategies of development, and distribution of their product*". Pemberdayaan berdasarkan pengertian tersebut dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Melihat definisi dari para tokoh tersebut pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memandirikan masyarakat melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya yang dimiliki agar memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan derajat martabat masyarakat tersebut, yang semula tidak mampu menjadi mampu.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi menurut Totok Mardikanto (2013: 30), yaitu:

1. **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.

2. **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Perkuatan tersebut meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

3. **Ketiga**, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurangberdayaan



dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan pula sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dalam kondisi saat ini belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan bentuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Prosesnya pemberdayaan masyarakat memiliki aspek penting yaitu program yang disusun sendiri oleh masyarakat mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, berbagai pihak terkait yang terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera sudah memuat aspek penting yang harus ada dalam pemberdayaan, yaitu program yang disusun sendiri oleh masyarakat yang dimana dalam proses pemberdayaan masyarakat Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera ini yaitu budidaya sayuran organik. Program tersebut ada untuk menjawab permasalahan yang muncul sebelum adanya pemberdayaan ini yang didalamnya mendukung keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

#### **1.5.4.2 Pengertian Ekonomi Masyarakat**

Memberdayakan ekonomi masyarakat adalah upaya perekonomian lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang mampu untuk mmengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Memberdayakan masyarakat melibatkan proses yang dimana penduduk adalah sebuah komunitas yang mengorganisasi diri dalam

membuat suatu perencanaan dan pelaksanaan secara kolektif dalam memecahkan permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial dengan kemampuan serta sumberdaya yang dimiliki. Menurut Edi Suharto (2014:59), proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui beberapa proses, yaitu:

1. Merencanakan program-program untuk memperbaiki perekonomian masyarakat
2. Memanfaatkan sumberdaya yang ada
3. Memecahkan masalah sosial
4. Menciptakan atau membuka akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak yang relevan.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, Musa Asy'arie (2008:141-144) berpendapat bahwa suatu institusi perlu mendorong masyarakat supaya terlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang sebagai wirausaha, dengan cara memberikan pelatihan sebagai dasar bagi masyarakat dalam memasuki dunia wirausaha. Program pembinaan berkelanjutan dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Pelatihan Usaha

Tahap ini, setiap masyarakat diberikan pemahaman konsep kewirausahaan itu seperti apa, bagaimana proses pemecahan masalah yang ada di dalamnya. Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan wawasan kepada masyarakat akan wawasan dunia wirausaha yang lebih mendalam dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat dalam berwirausaha. Peserta yang sudah mendapatkan pelatihan diharapkan paham akan teknik kewirausahaan, karena kesinambungan akan wawasan yang luas dapat berjalan dengan maksimal jika dipadukan dengan penguasaan teknik yang cukup.

## 2. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang, merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang usaha, tetapi faktor ini bukanlah yang terpenting. Mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil perlu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemberdayaan. Lembaga yang dimaksud baik itu lembaga keuangan, instansi pemerintah, ataupun mitra usaha.

Penambahan modal dari lembaga-lembaga yang terkait, sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan kelompok, setelah usaha itu sudah berjalan dan menunjukkan perkembangan profit yang baik kepada lembaga terkait, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangannya yang baik, kemudian dana yang dipakai berbunga, maka seringkali menjadi penyebab sulitnya usaha itu berkembang, karena profit yang ada habis untuk membayar bunga.

## 3. Pendampingan

Pada tahapan ini usaha yang dijalankan sebaiknya didampingi oleh tenaga pendamping profesional yang fokus di bidangnya. Pendampingan ini berfungsi sebagai pengarah maupun sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan benar-benar mampu berhasil dikuasainya, maka memungkinkan diadakannya usaha-usaha pengembangan. Jadi tahap pendampingan ini adalah penguatan agar setiap usaha yang dikembangkan benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Tahap pendampingan dapat dilakukan secara periodik, sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan demikian perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural, yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan ekonomi tradisional ke ekonomi modern, ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari

ketergantungan ke mandiri. Perubahan ini merupakan merupakan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi sumber daya, serta pemberdayaan manusia. Pemilihan langkah-langkah dasar dalam suatu kebijakan pemberdayaan dilaksanakan melalui beberapa tahapan strategis, yaitu:

- a. Memperkuat transaksi dan kemitraan usaha ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang tidak kalah pentingnya dalam memperkuat transaksi dan kemitraan usaha ekonomi kecil dengan cara pendekatan kebersamaan kelompok.
- b. Proses industrilisasi harus mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah setempat, yang umumnya agro-industri.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya akan tenaga kerja mandiri sebagai bahan adanya lapisan wirausaha baru muncul, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah, kuat dan saling menunjang satu sama lain.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat, berbicara keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh masyarakat terhadap suatu perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan alam memenuhi kebutuhan hidup, baik itu fisik, ekonomi, maupun sosial.

#### **1.5.4.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemberdayaan ditujukan untuk klien atau sasaran agar dapat meningkatkan

kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Pelaksanaan proses pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Mardikanto (2015:105) merumuskan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

1) Mengerjakan, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Dengan begitu masyarakat akan mengalami proses belajar yang nantinya akan berguna dalam jangka waktu yang lama.

2) Akibat, artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena, perasaan senang atau puas atau tidak senang atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa-masa mendatang.

3) Asosiasi, artinya, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat mencakup pada dalam kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat dalam mengerjakan sesuatu dengan tujuan masyarakat nantinya akan mengalami proses belajar yang akan berguna bagi kelangsungan hidupnya, lalu dalam pemberdayaan juga harus memberikan manfaat bagi pelaku pemberdayaan serta dalam sebuah kegiatan pemberdayaan harus berkaitan dengan kegiatan yang lain (relevan dan berhubungan dengan pemberdayaan) yang menjadi sebab terjadinya pemberdayaan tersebut.

Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip dalam menjalankan kegiatannya, yaitu dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor pemberdayaan, memberikan manfaat bagi masyarakat serta berkaitan dengan

permasalahan yang muncul sebelum adanya kegiatan pemberdayaan dimana kegiatan pemberdayaan ini berguna sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

#### **1.5.4.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Mardikanto (2014:202) terdapat enam tujuan pemberdayaan sebagai berikut:

##### Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan, jejaring kemitraan usaha.

##### 1. Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Perbaikan pendidikan dengan slogan “semangat belajar”, perbaikan akses bisnis, kegiatan serta perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

##### 2. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan bisnis yang dilakukan oleh setiap pelaku bisnis, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

##### 3. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

##### 4. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

##### 5. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan akan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan mandiri.

##### 6. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat serta mandiri..

Menurut Payne (dalam Agus Syafi’I, 2013: 39) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sumber daya serta mengambil setiap keputusan dan menemukan tindakan apa yang akan dilakukan, berkaitan dengan pribadi atau kelompok. Tindakan yang dilakukan termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan sumber daya yang ia miliki antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya sebagai berikut :

- a) Perbaikan pendidikan , dalam hal ini memiliki arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik agar proses pemberdayaan memiliki kualitas sumber daya yang baik/
- b) Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
- c) Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitrausahaan.
- d) Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- e) Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- f) Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas, sehingga masyarakat mengesampingkan kondisi lingkungan.
- g) Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan setiap keluarga dan masyarakat sejahtera.

h) Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang mandiri dan sehat.

#### **1.5.4.5 Tahapan Pemberdayaan**

Adapun tahapan pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto Adi (2012:35-37) bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- 2) Tahap *assesment*, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4) Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepihak penyandang dana.
- 5) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.



6) Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.

7) Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Pelaksanaan program pemberdayaan Kelompok Sayur Organik di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta sudah berjalan pada tahap pelaksanaan, masyarakat yang tergabung dalam anggota Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera menjalankan segala kegiatan program mengacu pada peraturan yang sudah ditentukan dari Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera agar segala proses kegiatannya bisa terlaksana dengan baik.

#### **1.5.4.6 Lingkup dan Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Sumadyo (dalam Mardikanto, 2013: 115), menjabarkan dalam setiap pemberdayaan masyarakat terdapat tiga upaya pokok, yang disebut Tri Bina, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Mardikanto (2013:118) menjelaskan pentingnya peran Bina Kelembagaan, karena ketiga Bina yang dikemukakan (Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan) itu hanya akan terlaksana seperti yang diharapkan, jika didukung oleh efektivitas dari beragam kelembagaan yang diperlukan. Berikut Bina yang diungkapkan ialah:

##### **1. Bina Manusia**

Upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk

perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Dalam sebuah ilmu manajemen sendiri, manusia berperan sebagai sumber daya sekaligus roda penggerak dalam manajemen tersebut. Bina Manusia meliputi semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas, yaitu:

Pengembangan kapasitas individu merupakan serangkaian strategi atau upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta responsivitas dari kinerja seorang individu yang di dalamnya meliputi pengembangan kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalitas.

Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan merupakan suatu strategi atau pendekatan pembangunan dimana semua orang dalam organisasi tersebut memiliki hak yang sama dalam mewujudkan pembangunan di organisasi tersebut. Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan meliputi:

- 1) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi
- 2) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi
- 3) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi
- 4) Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya
- 5) Interaksi antar individu di dalam organisasi
- 6) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.

Pengembangan kapasitas jejaring merupakan gabungan antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengembangan kapasitas jejaring, meliputi:

- 1) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama; dan
- 2) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

## 2. Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, Bina Manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya Bina Manusia yang mampu (dalam waktu dekat atau cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Bina usaha dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat dengan kegiatannya yang meliputi:

- 1) Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk;
- 2) Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan;
- 3) Pengembangan jiwa kewirausahaan terkeit dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal;
- 4) Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi;
- 5) Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

## 3. Bina Lingkungan

Selama ini, pengertian lingkungan seringkali dimaknai sekadar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya–alam dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Kesadaran seperti itulah yang mendorong diterbitkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang di dalamnya mencantumkan

tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh penanam modal atau perseroan. Di lingkungan internasional, sejak 2007 telah ditetapkan ISO 26000 tentang tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*).

Termasuk dalam tanggungjawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan area kerja, maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal atau perseroan. Tanggungjawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi atau reklamasi) sumberdaya-alam dan lingkungan hidup.

#### 4. Bina Kelembagaan

Tersedianya suatu lembaga dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan. Pengertian tentang kelembagaan seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok/organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas. Hayami dan Kikuchi mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata "*institution*" adalah satu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi.

Terkait dengan Bina Kelembagaan, dalam kegiatan agribisnis, misalnya, diperlukan beragam kelembagaan. Mardikanto (2013:120) menyatakan bahwa untuk membangun struktur pedesaan yang progresif dibutuhkan kelembagaan-kelembagaan:

- 1) Sarana produksi dan peralatan yang menunjang
- 2) Kredit produksi
- 3) Pemasaran produksi
- 4) Percobaan atau pengujian lokal
- 5) Penyuluhan
- 6) Transportasi

Pada proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera, bina manusia sudah dilaksanakan lewat berbagai jenis pembinaan dan penyuluhan yang diberikan oleh yayasan atau dinas terkait sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Dalam bina usaha, manfaat bagi kesejahteraan ekonomi juga telah dipenuhi melalui sistem pemberian harga yang sama rata kepada semua anggota kelompok dalam menjual hasil bibit tanaman. Pada bina lingkungan, dengan adanya pemberdayaan ini telah mengurangi pembuangan limbah sampah karena dapat diolah menjadi pupuk sebagai bahan dasar tanaman serta menghijaukan lingkungan sekitar di Desa Ngemplak Sutan. Bina kelembagaan, keberadaan Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera ini, dalam proses pemberdayaan menjadi lebih terorganisir karena ada lembaga yang mengawasi dan mengelola proses pemberdayaan agar berjalan sesuai dengan tujuan lembaga.

#### **1.5.4.7 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan**

Menurut UNICEF (dalam Gunawan Sumodiningrat, 2009:138-139) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi yang dapat menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan/efektivitas pemberdayaan. Lima dimensi tersebut yaitu:

- 1) Kesejahteraan

Pemberdayaan dapat dikatakan berhasil jika memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan bagi masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat mampu diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar yang ada seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

## 2) Akses

Dimensi ini terkait dengan kesetaraan dalam mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan serta dalam mendapat manfaat yang dihasilkan dari pemberdayaan. Tidak adanya akses membuat pemberdayaan menjadi tidak terlaksana. Salah satu dampak dari tidak adanya akses yang dimiliki yaitu terjadinya kesenjangan di masyarakat. Akses yang dimaksud sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan ialah akses fisik dan akses non fisik. Akses fisik adalah akses yang dapat dilihat dalam bentuk nyata seperti sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan pemberdayaan, yang dalam hal ini ialah sayuran organik. Adapun yang dimaksud dengan akses non fisik ialah minat dan keinginan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam tersebut menjadi lebih bermanfaat dan menyejahterakan.

## 3) Kesadaran Kritis

Dimensi ini berupa kesadaran dari masyarakat bahwa kesenjangan yang terjadi itu mampu diubah dan memang harus diubah salah satunya dengan kegiatan pemberdayaan.

## 4) Partisipasi

Keikutsertaan dari masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan yang ada, sehingga masyarakat ikut berperan serta dalam setiap keputusan yang diambil. Partisipasi masyarakat baik dalam lembaga yang dibentuk maupun langsung dalam kegiatan pemberdayaan menjadikan masyarakat turut serta dalam proses pengambilan keputusan sehingga kepentingan masyarakat tidak terabaikan. Dalam pelaksanaannya di Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera, masyarakat

sudah berpartisipasi dalam kegiatan budidaya sayuran organik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 5) Kontrol

Pada pemberdayaan ini masyarakat memiliki kemampuan untuk mengontrol pendayagunaan yang ada. Kontrol merupakan serangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk atau arahan kepada kelompok masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan di Desa Ngemplak Sutan yang dalam hal ini ialah masyarakat yang merupakan anggota dalam Kelompok Sayur Organik Kahuripan Sejahtera agar dapat menjalankan budidaya sayuran organik dengan baik dan benar serta memberikan manfaat bagi anggota itu sendiri.

Sumodiningrat (2009:138-139), menjelaskan untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan/efektivitas dari suatu kegiatan pemberdayaan juga diperlukan indikator-indikator yang menjadi tolak ukur diantaranya yaitu:

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b) Berkembangnya usaha untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
- c) Meningkatnya kepedulian dari masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di daerahnya
- d) Meningkatnya kemandirian kelompok dengan berkembangnya usaha produktif masyarakat, permodalan kelompok semakin kuat, serta meluasnya interaksi masyarakat.
- e) Kapasitas masyarakat meningkat dan terjadi pemerataan pendapatan.

#### 1.5.4.8 Faktor Pemberdayaan

Faktor pemberdayaan mengemukakan kelemahan dan kelebihan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan kegagalan yang dialami kelompok pemberdayaan dalam upaya mencapai tujuan. Selain itu, banyak dari program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan berasal dari kelompok.

Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat mengatakan bahwa sebuah komunitas dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, tetapi dalam realita di masyarakat tidak akan ikut dan berpartisipasi penuh dalam setiap program tersebut. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014:98-99) menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi Lingkungan, dapat berasal dari budaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial, hukum dan dari kondisi alam (geografis).
- b. Sumber daya merupakan sumber daya yang digunakan dalam mendapatkan kebermanfaatan dari pelaksanaan program.
- c. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yaitu sumber daya yang terlibat dalam proses pelaksanaan program yang menjadi penentu tercapainya tujuan program. Para pelaksana program ini harus memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang yang sesuai dengan program.



## 1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena yang akan diteliti pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Kampung Sayur Organik di Desa Ngemplak Sutan..

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Ngemplak Sutan, dapat diketahui berjalan atau tidaknya melalui dimensi keberhasilan pemberdayaan menurut UNICEF (dalam Gunawan Sumodiningrat, 2009:138-139) berikut ini:

1. Kesejahteraan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat kecil atau kurang/tidak mampu yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti,
  - a. Sandang
  - b. Pangan
  - c. Papan
  - d. Pendidikan

Tolak ukur diatas yang akan menilai bagaimana kondisi kesejahteraan di Desa Ngemplak Sutan Kel.Mojosongo Kec.Jebres Kota Surakarta

2. Akses adalah kesetaraan dalam mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan serta kesetaraan dalam mendapatkan manfaat yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat. Akses menggambarkan bagaimana terbukanya akses masyarakat di Desa Ngemplak Sutan dalam memperoleh sumberdaya produktif yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat di Desa Ngemplak Sutan.
3. Kesadaran Kritis, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Ngemplak Sutan bahwa kesenjangan yang terjadi di masyarakat merupakan masalah sosial yang harus diubah.

4. Partisipasi, yaitu peningkatan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi maupun proses pembangunan serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngemplak Sutan.
5. Kontrol, yaitu peran semua lapisan masyarakat di Desa Ngemplak Sutan dalam mengontrol pengelolaan sumber daya yang ada.

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014:98-99) mengemukakan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kampung Sayur Organik di Desa Ngemplak Sutan terdiri dari:

- a. Kondisi Lingkungan, yaitu melihat dari budaya, kondisi perekonomian, kondisi sosial, hukum, dan kondisi alam (geografis).
- b. Sumber daya merupakan sumber daya yang digunakan dalam mendapatkan kebermanfaatan dari pelaksanaan program.
- c. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yaitu sumber daya yang terlibat dalam proses pelaksanaan program yang menjadi penentu tercapainya tujuan program. Para pelaksana program ini harus memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang yang sesuai dengan program.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan melihat fenomena yang ada di lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara lebih mendalam.

Pada dasarnya tipe penelitian dibagi menjadi tiga macam, berikut tiga macam penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian Diskriptif, merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.
2. Penelitian Eksploratif, merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau fenomenabarbaru yang ditunjukkan. Tujuan penelitian Eksploratif untuk memutuskan pernyataan – pernyataan yang lebih akurat.
3. Penelitian Eksplanatif, merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu permasalahan bisa terjadi atau gejala masalah itu terjadi. Penelitian ini juga membuktikan adanya hubungan yang dipengaruhi ,mempengaruhi dan sebab akibat.

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan, peneliti menggunakan model desain penelitian deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana proses manajemen pemberdayaan masyarakat di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan, melukiskan, secara faktual dan akurat suatu fakta, sifat serta fenomena yang diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan tentang hal yang terjadi di lapangan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi foto, videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

### **1.7.2 Subjek Penelitian**

Dalam penelitian diskriptif kualitatif informan dalam penelitian ini ada 4 (empat) yaitu Kepala Kampung Sayur Organik, Staf ahli Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan/ Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, dengan bekerja sama dengan Yayasan Rumah Zakat, masyarakat RW 37. Penelitian ini menggunakan teknik menggunakan snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-kelamaan menjadi banyak dan besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang didapat sedikit, maka dari itu belum mampu memberikan data yang diharapkan, maka mencari narasumber lain yang akan digunakan sebagai sumber data.

### **1.7.3 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah tempat dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Penelitian ini mengambil tempat di Kampung Sayur Organik yang bertempat di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Penelitian ini mengambil judul tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Sayur Organik di Desa Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta”. Penelitian ini memiliki fokus studi tentang bagaimana proses pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Sayur Organik di Desa Ngemplak Sutan yang terdiri dari bagaimana proses manajemen pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor pendukung serta penghambat program pemberdayaan masyarakat.

#### **1.7.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis, teks gambar, dan bukan angka-angka.

#### **1.7.5 Sumber data**

Sugiyono (2015:157) menjelaskan bahwa bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer, adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala/Anggota Kelompok sebagai pelaku kegiatan dari Pengurus Kampung Sayur Organik, Staf ahli Tenaga Kerja Dinas Ketahanan Pangan/ Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas Pertanian Kota Surakarta, Pengurus Yayasan Rumah Zakat, masyarakat RW 12.
2. Data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Di dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal, internet maupun buku-buku yang terkait.

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, ide dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Melalui teknik wawancara, peneliti menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Kampung Sayur Organik di Desa Ngemplak Sutan serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dengan *interview guide*. Peneliti memilih informan sesuai dengan ketentuan seperti orang yang jujur dan bisa dipercaya, pejabat berwenang, orang yang suka berbicara dan mengerti tentang teknis Pengelolaan Kampung Sayur Organik, kemudian peneliti membuat panduan wawancara (*Interview Guide*).

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, bagan dan sebagainya.

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa catatan-catatan, rekaman, dan foto dari informan.

### 1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui analisis data di lapangan. Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) menjelaskan bahwa:

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevandan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi, data akan mengerucut semakin sedikit

dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel disertai uraian penjelas yang bersifat deskriptif.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:252) adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

### **1.7.8 Kualitas Data (Goodness Criteria)**

Pada penelitian kualitatif harus dapat menunjukkan data yang valid dan reliable dengan melakukan uji keabsahan data. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan yang lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Pada penelitian ini, penggunaan teknik triangulasi yang digunakan melingkupi triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data:

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

#### 2. Triangulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara yang kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.